

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH PUSAT DENGAN REKOMENDASI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Muhammad Yusuf^{1*}, Nita Gustiana²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, Indonesia

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Indonesia

*Email : Muhammad.yusuf@bri-institute.ac.id

Diterima 01 November 2022, Disetujui 07 November 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan dengan variabel *moderating* tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat yang terdapat di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2018-2020 dengan 88 pemerintah pusat sampel yang menggunakan metode *sampling design*. Variabel independen penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Opini Audit. Sementara variabel moderating dalam penelitian ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa (1) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit. (2) kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit. (3) tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap opini audit. (4) tindak lanjut rekomendasi audit dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan opini audit. (5) tindak lanjut rekomendasi audit tidak dapat memoderasi kepatuhan dan opini audit.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan, Opini Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Abstract

This study aims to determine the effect of internal control system, compliance with variable moderating follow-up recommendation on audit opinion. The sample used in this study to a central government on the semester examination results overview, inspection report, and follow up recommendation in the 2018-2020 with 88 sample central government using sampling design method. The independent variable is internal control system and compliance. The dependent variable is the audit opinion. While the moderating variable, follow up recommendations. The result of the tests indicated that (1) internal control system has significant effect on audit opinion. (2) compliance has no significant effect on audit opinion. (3) follow-up recommendation has significant effect on audit opinion. (4) follow-up recommendation as a moderating variable able to moderate the effect of internal control system and audit opinion. (5) follow-up recommendation as a moderating variable not able to moderate the effect of compliance on audit opinion..

Keywords : *internal control system, compliance, follow-up recommendation, audit opinion*

PENDAHULUAN

Pemerintah seringkali melakukan berbagai upaya demi menjaga dan meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dari keuangan Negara/Daerah salah satunya dengan mencetuskan tiga UU perihal Keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 01 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

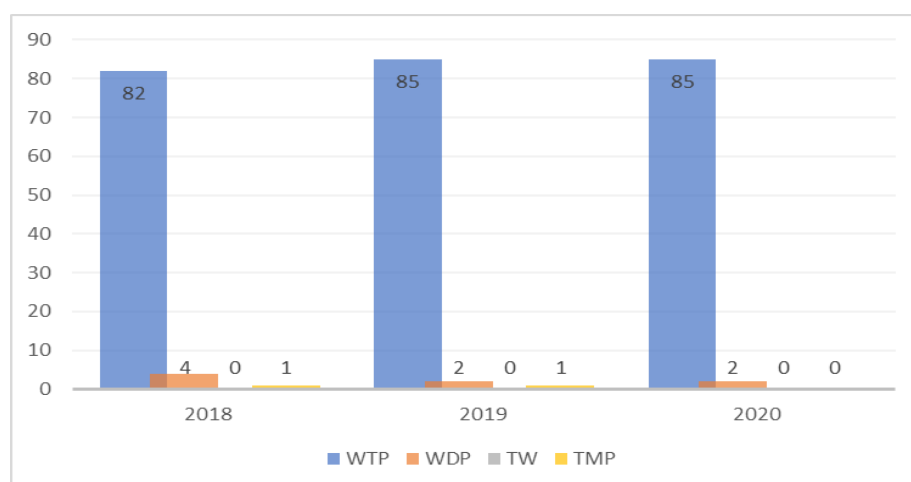
Penerbitan laporan keuangan untuk pertanggung jawaban wajib dilakukan oleh pemerintahan pusat, kabupaten, kota, dan provinsi pada aktivitas yang diselenggarakan. Informasi yang berisi tentang keuangan ialah hasil akhir yang didapatkan dari proses akuntansi dalam hal ini dokumen tersebut berupa suatu laporan.

Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang berisi Jenis Opini tercantum empat jenis opini dari apa yang diputuskan pemeriksa BPK dalam memeriksa laporan keuangan, yakni opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Sujarweni (2015:70) adalah serangkaian tahapan yang menguraikan perihal seluruh proses yang terjadi pada organisasi. Pengendalian internal merupakan proses yang termasuk ke dalam manajemen dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa laporan keuangan telah berhasil memeriksa 264 objek pemeriksaan. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa 252 merupakan opini WTP, 8 termasuk pada opini WDP, dan 2 tergolong pada opini TMP. Adapun penjabaran tersebut telah tertera pada Grafik tersebut:



Gambar 1. Opini LKLL dan LKBUN Tahun 2018-2020

Sumber : Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018-2020 BPK

Selain itu penelitian mengenai SPI terhadap Opini audit telah dilakukan diantaranya penelitian yang merupakan pengembangan dari syaputra, Hasan, Rasuli (2019), Dalam riset-riset tersebut menghasilkan temuan bahwa SPI mempunyai pengaruh terhadap Opini Audit, sedangkan riset yang dilakukan oleh penelitian Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitriosis (2020) memiliki pernyataan yang berbeda. Dalam riset tersebut SPI memiliki pengaruh terhadap pemberian opini WTP pada LKPP secara negatif dan signifikan.

Selain itu ada beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan terhadap undang-undang atas opini audit yang diteliti oleh Santi Ananda Putri, Wayan Rai Suarhana, dan Sigit Edi (2018) dan Natama (2021) mengenai Kepatuhan menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap opini audit. Sebaliknya, Mahardika Dwi Putri, Ethika dan Herawati (2018) telah meneliti dengan tema yang sama namun memiliki pernyataan yang berbeda. Dalam penelitian mereka menghasilkan kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit. Penelitian ini juga menyatakan bahwa Kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitriana menyatakan bahwa Kepatuhan pada perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit

Masalah dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat dengan Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat, dan merekomendasi Audit mampu memoderasi sistem pengendalian internal, kepatuhan berpengaruh terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar. mementingkan kepentingan diri sendiri.

Opini Audit

Arens (2015) opini audit adalah Pendapat auditor berupa pernyataan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material yang didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan ditemukan auditor.

Sistem Pengendalian Internal

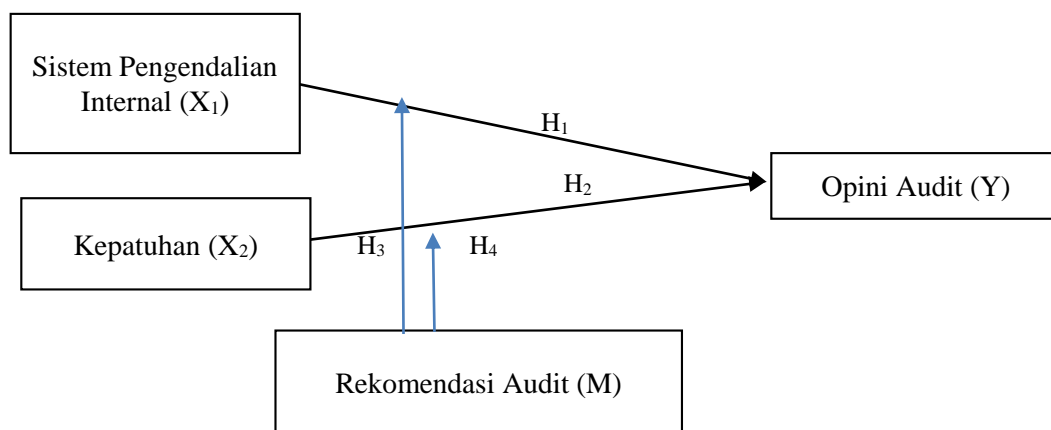
Sistem pengendalian internal adalah sistem yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi,

serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan adalah dorongan kepentingan pribadi terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku, yaitu apa yang orang anggap moral dan bertentangan dengan kepentingan

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODELOGI

Variabel Opini Audit

Dalam penelitian ini Opini audit diukur dengan menggunakan proksi skala ordinal di pilih dalam penelitian untuk mengkategorikan berbagai macam opini. Menurut (Ghozali, 2001:4) skala ini juga membuat rangking pada

pribadinya. BPK RI memberikan indikator kepatuhan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut patuh pada ketentuan administrasi, patuh pada perikatan perdata, tidak melakukan penyimpangan yang mengandung unsur pidana (Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (2018).

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.

tiap kategori, tidak hanya mengkategorikan data ke kelompok. Skala ordinal yang diperoleh pada tiap kategori opini yaitu:

- 1 = Tidak Memberikan Pendapat
- 2 = Tidak Wajar
- 3 = Wajar Dengan Pengecualian
- 4 = Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

5 = Wajar Tanpa Pengecualian

Variabel Sistem Pengendalian Internal

SPI sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kelemahan SPI yang diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018, 2019, dan 2020 BPK RI.

Jumlah temuan tersebut dipisahkan ke dalam tiga kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Variabel Kepatuhan

Variabel kepatuhan diukur dengan menggunakan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dipisahkan ke dalam tujuh kategori yaitu temuan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian pemerintah pusat, temuan potensi kerugian pemerintah pusat, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, temuan mengenai ketidakefisienan, serta temuan mengenai ketidakefektifan.

Variabel Rekomendasi Audit

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit. Untuk setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh orang / badan berwenang untuk mengambil Tindakan, sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi (TLRHP) adalah jumlah tindak

lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sesuai dengan Rekomendasi BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Menurut (Arifianti, dkk 2013).

Populasi, Sampel, dan Sampling Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 264 laporan keuangan dari 88 objek pemeriksaan yaitu pemerintah pusat pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Metode sampel yang digunakan adalah metode area sampling design yang merupakan kluster geografis dalam area pulau Jawa (Sekaran, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini dikumpulkan melalui website resmi www.bpk.go.id.

Metode Analisis Data

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini tipe hubungan antar variabelnya merupakan hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) yaitu menguji pengaruh SPI dan kepatuhan LKPP terhadap opini dengan tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variable moderating atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik analisis berikut untuk menguji hipotesis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.65502	1.737096	-6.709487	0.0000
X ₁	1.195226	0.316826	3.772499	0.0002
X ₂	0.086295	0.048069	1.795254	0.0744
Z	0.426733	0.068365	6.242004	0.0000
SPI_TLRHPS	-0.041533	0.011105	-3.740023	0.0003
KEPATUHAN_TLRHPS	0.001372	0.001936	0.708527	0.4796

Sumber : Data diolah dengan eviews 10, 2022

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel SPI (X₁) terhadap variabel Y sebesar $0,0002 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.772499 > t$ tabel (1.96920), berarti terdapat pengaruh variabel SPI (X₁) terhadap Variabel Y.

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kepatuhan (X₂) terhadap variabel Y sebesar $0,0744 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $1.795254 < t$ tabel (1.96920),

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel SPI_TLRHPS terhadap variabel Y sebesar $0,0003 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.740023 > t$ tabel (1.96920), diterima yang berarti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dapat memperkuat hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit (Y).

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kepatuhan _TLRHPS terhadap variabel Y sebesar $0,4796 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $0.708527 < t$ tabel (1.96920 berarti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak dapat memperkuat hubungan kepatuhan terhadap Opini Audit (Y).

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit

Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel Sistem Pengendalian Internal, diperoleh nilai variabel Y sebesar $0,0002 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.772499 > t$ tabel (1.96920), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dimana hasil penelitian tersebut menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh semakin besar kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah pusat untuk menerima opini WTP. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimaksud diantaranya adalah pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan

laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit

Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel Kepatuhan, diperoleh variabel Y sebesar $0,0744 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $1.795254 < t$ tabel (1.96920), Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Ethika dan Herawati (2018) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap Opini Audit. Hal tersebut berarti secara parsial, jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit, adanya pelanggaran yang material atas peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Moderasi Rekomendasi dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan terhadap Opini Audit

Rekomendasi Audit dapat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit. Hasil ini didukung oleh hasil pengujian hipotesis moderasi yang menunjukkan bahwa nilai variabel Y sebesar $0,0003 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.740023 > t$ tabel (1.96920), sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit t dapat memoderasi

pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit.

Hasil ini menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit mampu memperkuat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2016) dalam Nur Fitriana tahun 2020. Kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan opini WTP, kualitas laporan keuangan, dengan adanya perbaikan atas kelemahan yang ada dalam rekomendasi audit dapat meningkatkan opini audit yang ditunjukkan dengan semakin berkualitasnya laporan keuangan.

Moderasi Rekomendasi dan Kepatuhan terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bagian sebelumnya peneliti memperoleh hasil bahwa dari 88 jumlah sampel pemerintah pusat Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit. Hasil ini didukung oleh hasil pengujian hipotesis moderasi yang menunjukkan bahwa variabel Y sebesar $0,4796 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $0.708527 < t$ tabel (1.96920), Audit tidak mampu memoderasi pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fitriana dkk (2020) yang menghasilkan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara Kepatuhan dengan Opini Audit. Hal tersebut karena Kepatuhan pada

perundang-undangan tidak langsung berpengaruh terhadap opini tetapi kepatuhan pada perundang-undangan mempengaruhi tindak lanjut atas rekomendasi audit yang berimplikasi pada penerimaan opini LKPP, adanya sistem pengendalian internal yang efektif yang dapat menghindari tindakan kecurangan, pemborosan, dan penyelewengan. Sehingga ada pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan penerimaan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh semakin besar kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah pusat untuk menerima opini WTP. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimaksud diantaranya adalah pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

2. Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal tersebut berarti secara parsial, jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit dapat mampu memperkuat hubungan sistem pengendalian internal dan opini audit, hal tersebut karena kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan opini WTP.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak mampu memperkuat hubungan kepatuhan dan opini audit, hal tersebut karena kepatuhan pada perundang-undangan tidak langsung berpengaruh terhadap opini tetapi kepatuhan pada perundang-undangan mempengaruhi tindak lanjut atas rekomendasi audit yang berimplikasi pada penerimaan opini LKPP.

Saran

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disarankan untuk lebih sering memberikan sosialisasi dalam penyusunan laporan keuangan Daerah, mengingat SDM di daerah, khususnya daerah 3T (Terpencil Terjauh dan tertinggal) masih banyak yang belum memahami tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pelaporan keuangan..

2. Bagi Pemerintah daerah disarankan agar selalu melakukan system pengendalian Internal secara terstruktur agar dapat Menyusun laporan keuangan lebih akurat dan mengurangi salah saji yang material.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah alat ukur pada variabel dependen sebagai alat ukur sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. R. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Arifianti, Hemin.dkk. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia". Universitas Sebelas Maret. SNA XVI.
- Ayu Ratna Sari, Herry Winarto. (2020). J (Anggreny Bangsawan, Achdian, Abbas, Ahmad, 2021) *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisna Dwi Payana. Pengaruh Pengendalian Intenal dan Bukti Audit*, 1.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), 2018, penerbit Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesia.
- Mahardika Dwi Putri, Ethika dan Herawati, (2018) *Pengaruh Kondisi Keuangan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepatuhan Perusahaan Pada Hukum Dan Peraturan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern*, Journal Universitas Bung Hatta.
- Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitriios. (2020). *Jurnal Akuntansi. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Dana Insentif Daerah*, 2.
- Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017, tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Penerbit BPK RI.
- Shafira Ramadhia Utami, Sulardi. (2019). *Audit. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 253-263.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tirtha Syaputra, Amir Hasan, Rasuli (2019), *Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi*, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau*